

PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP KINERJA APARATUR PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN MINAHASA

Don Leonardo Wongkar¹, Ventje A. Senduk², Linda A.O. Tanor³

Akuntansi, FE Universitas Negeri Manado, Tondano¹, FE Universitas Negeri Manado, Tondano², FE Universitas Negeri Manado, Tondano³

donleonardowongkar@gmail.com

Diterima: 08-12-2020 Disetujui: 09-02-2021

Abstrak

Fenomena penyerapan anggaran yang kurang maksimal terjadi pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa, dimana permasalahan yang terjadi yaitu penyerapan anggaran yang kurang maksimal, tidak melaporkan laporan realisasi penyerapan keuangan maupun fisik sesuai jadwal yang di tetapkan, kurang matangnya perencanaan, adanya berbagai kendala. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yang bertujuan untuk melihat pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah di kabupaten minahasa. Populasi dalam penelitian ini adalah 264 orang ASN Dinas/Badan dengan sampel 53 orang ASN (20%) dari populasi. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan metode angket/kuesioner. Hasil uji hipotesis memperlihatkan bahwa anggaran berbasis kinerja mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,040 yaitu lebih kecil dari 0,05 yang artinya H1 diterima dan bisa disimpulkan bahwa Variable anggaran berbasis kinerja memberikan pengaruh positif kepada variable kinerja aparatur pemerintah daerah dengan presentase 13,7%.

Kata kunci: Anggaran, Kinerja Yang Maksimal, Aparatur Pemerintah Daerah

Abstract

The phenomenon of less than optimal budget absorption occurs in every minahasa regency government regional work unit, where the problems that occur were less than optimal budget absorption, not reporting reports on the realization of financial and physical absorption according to the set schedule, inadequate planning, various obstacles. This studied uses a quantitative method, which aims to saw the effect of performance-based budgets on the performance of local government officials in minahasa district. The population in this studied were 264 asn service / agency with a sample of 53 asn (20%) of the population. The data collection technique in this studied used a questionnaire / questionnaire method. Hypothesis test results show that performance-based budgeting had a significance leveled of 0. 040, which was less than 0. 05, which means h1 was accepted and it could be concluded that the performance-based budget variable had a positive influence on the performance variable of local government officials with a percentage of 13. 7%.

Keywords: Budget, Maximum Performance, Local Government Apparatus

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan kekuasaan, wewenang, dan kewajiban daerah otonom dalam mengelola dan mengatur daerah masing-masing yang berhubungan dengan pekerjaan pemerintahan dan keinginan rakyat suatu wilayah tersebut berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga diperlukan bentuk manajemen finansial suatu wilayah secara teratur untuk mengelola anggaran pusat secara jelas, cermat, berdaya guna, ampuh, serta dapat di pertanggungjawabkan. Setelah berlakunya aturan ini maka memberikan kesempatan untuk suatu wilayah dalam mencari kemampuan wilayah tersebut supaya bisa mengembangkan kinerja prestasi secara finansial dengan tujuan menjadikan daerah setempat menjadi independen. Adapun prinsip-prinsip kemandirian suatu wilayah tercantum dalam UU No.32 Tahun 2014.

Pengelolaan keuangan yang baik adalah hal yang sangat penting dalam proses melaksanakan atau menjalankan pekerjaan dalam membangun baik di tingkat pemerintahan pusat maupun daerah. Namun yang paling sering mengalami permasalahan dalam berkembangnya pembangunan adalah daerah, terutama daerah-daerah yang kurang potensial. Oleh karena itu, suatu daerah harus bisa mencari dan mengelola resource di daerahnya masing-masing agar bisa membiayai anggaran belanja daerah yang diperlukan, itulah yang menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah, implementasi pengelolaan perekonomian suatu wilayah otonom menjadi bagian penting yang harus diperhatikan pemerintah sehubungan dengan bertambahnya bobot pekerjaan yang meningkat pada setiap tahunnya.

APBD dirancang sesuai dengan pendekatan kinerja, dimana suatu skema anggaran yang memprioritaskan usaha dalam pencapaian hasil kerja atau output dari rencana pembagian dana atau input yang telah ditetapkan (PP no.58 tahun 2005). Sehingga, untuk program penyusunan agenda APBD, pemerintah daerah dan DPRD bersama-sama membuat strategi APBD secara keseluruhan, yang pada dasarnya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang sudah disepakati dalam RPJMD 5 tahun dan rencana keseluruhan daerah disusun sesuai RPJPD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan standard service minimum sesudah penetapan.

Gary Dessler (2015:13) mengemukakan bahwa, "Kinerja adalah sebagai berikut: "The willingness of a person or group of people to carry out activities and refine them in completely with their responsibilities with the expected results". Pendapat tersebut memiliki arti kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan.

Bagi instansi pemerintahan, kinerja pemerintahan yang baik tidak hanya diperlukan strategi yang baik, namun juga konsep dan alur pelaksanaan kebijakan yang baik; dua hal terakhir itu membutuhkan skema pengelolaan pemerintah secara jelas dan perlu adanya SDM yang baik.

Kinerja aparatur pemerintah dapat diukur dengan 7 indikator menurut Hasbar Mustofa H (2014:42): Ketetapan waktu kerja, patuh dalam menaati peraturan, hasil kerja yang baik, menyelesaikan tugas pekerjaan dengan mood yang baik, hubungan dan komunikasi yang baik, mampu memberikan motivasi dan nilai tambah, tanggung jawab terhadap asset pemerintah.

Menurut Mahmudi (2016:69) definisi anggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut: "Anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara anggaran (input) dengan keluaran (output) dan hasil

(outcome) yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut”.

Dedi Nordiawan (2007) Input, output dan outcome merupakan indikator yang ada dalam susunan anggaran berbasis kinerja. Pertama, input adalah semua hal yang diperlukan supaya proses aktivitas bisa berjalan untuk membuat output. Indikator ini menjadi barometer prestasi dengan dasar tingkatan atau jumlah keuangan, SDM, product, time, technology, juga bagian-bagian lain yang dipakai dalam menjalankan agenda dan aktivitas. Dengan meninjau alokasi resource, suatu instansi bisa menguraikan apakah pembagian resource yang dimiliki sudah cocok seperti tujuan strategi yang sudah diatur. Kedua, output merupakan hasil yang bersifat barang atau jasa yang didapatkan dari rancangan atau aktivitas berdasarkan Input. Indikator output merupakan objek sasaran secara langsung yang ingin diraih berdasarkan aktivitas yang dapat menyerupai materi maupun non materi. Jika memperhatikan indikator output organisasi maka dapat melihat pekerjaan apa saja yang bisa tersosialisasikan berdasarkan strategi perencanaan. Ketiga, outcome adalah segala sesuatu yang memperlihatkan hasil kerja output kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator outcome merupakan suatu faedah yang ingin didapatkan dari output. Dasar ini memperlihatkan hasil dari output suatu pekerjaan.

Febrina (2016) menemukan adanya pengaruh positif yang terjadi antara anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Jika anggaran berbasis kinerja dijalankan lebih banyak, maka akan lebih meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah, dan para peneliti sebelumnya juga menunjukkan hasil yang mirip mengenai Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Halidayati, I. (2014), Soraya, G., Rika, R., & Cherya, C. (2014), Oktaviani, I. S. (2016), Verasvera, F. A. (2016), Junery, M. F., & Norhanisah, N. (2018).

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah harus berdaya guna, cermat, jelas, bertanggung jawab, tertib, adil, dan sesuai dengan ketentuan. Tujuannya yaitu demi penyeragaman pemahaman juga peningkatan efisiensi serta efektivitas dalam mengelola keuangan. Lebih khusus institusi pemerintah yang ada di daerah mapupun yang ada di pusat, banyak SKPD di Pemkab Minahasa yang tidak melaporkan realisasi penyerapan keuangan maupun fisik sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga Bupati Kabupaten Minahasa meminta perhatian dan kerja samanya kepada pimpinan SKPD agar dalam mengelola keuangan dilakukan dengan tertib administrasi pelaporan realisasi keuangan dan fisik dilakukan sesuai system monitoring EPPA.

Fenomena penyerapan anggaran yang kurang maksimal terjadi pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa, dimana permasalahan yang terjadi yaitu penyerapan anggaran yang kurang maksimal, tidak melaporkan laporan realisasi penyerapan keuangan maupun fisik sesuai jadwal yang di tetapkan, kurang matangnya perencanaan, adanya berbagai kendala.

Berdasarkan landasan teori dari para ahli, penelitian sebelumnya, serta latar belakang masalah yang ada maka dapat disimpulkan hipotesis yaitu:

H¹: Terdapat pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sugiyono (2017: 8) mengemukakan, penelitian kuantitatif merupakan method penelitian yang didasarkan pada filosofi positifis, dipakai dalam melakukan penelitian terhadap populasi atau sampel tertentu, memakai alat penelitian untuk pengumpulan data, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dan

tujuannya untuk menguji asumsi yang telah ditentukan sebelumnya. Penelitian ini juga merupakan penelitian survey, penelitian survey adalah suatu teknik mengumpulkan data dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang di ajukan pada narasumber dalam bentuk sample dari sebuah populasi dan menggunakan angket atau kuesioner sebagai media dalam mendapatkan data yang akan di olah. Populasi merupakan subyek penelitian. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. (sugiyono, 2015)

Populasi dari penelitian ini yaitu 264 ASN Satuan Dinas/Badan yang ada di Kabupaten Minahasa. Dari data yang ada, jumlah SKPD di Kabupaten Minahasa berjumlah 33 SKPD. Mengingat adanya kemungkinan tidak semua penjawab mengisi semua angket sampai jadwal pengambilan yang sudah ditentukan, sehingga berdasarkan situasi ini merupakan hal yang tidak mungkin untuk melakukan penelitian pada semua populasi. Maka dari itu, dalam penelitian ini peneliti mengambil sebagian sample sebagai perwakilan dari populasi dengan tepat. Dalam penelitian deskriptif jika populasinya besar maka minimal diambil sampel sebesar 20% dari populasi (Gay dan Dehl 1996).

Sugiyono (2018:131) mengemukakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Menurut Sugiyono (2018:136) nonprobability sampling adalah cara mengambil sample dengan tidak memberikan peluang/kesempatan yang sama bagi semua bagian atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dengan kriteria pengambilan sampel yaitu aparatur yang berhubungan serta memiliki kepentingan dalam merancang anggaran dimana ada 264 di 33 SKPD di Kabupaten Minahasa dengan penentuan ukuran sampel 53 orang (20%) dari 264 ASN yang termasuk dalam kriteria peneliti sesuai dengan objek dalam penelitian ini.

Untuk penelitian ini peneliti memakai metode kuesioner, yaitu dengan menyebar kuesioner kepada responden, dalam hal ini aparat pemerintah daerah kabupaten minahasa. Kuisisioner adalah banyak pertanyaan tertulis, digunakan untuk memperoleh informasi dari orang yang diwawancarai mengenai pengetahuannya secara pribadi atau laporan dari sesuatu yang diketahuinya. Kuisisioner tersebut dibagikan langsung kepada orang yang diwawancarai dan orang yang diwawancarai diminta untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuisisioner tersebut. Metode regresi linear sederhana adalah metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini guna mengukur sejauh mana pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Berikut ini adalah persamaan umum regresi linear sederhana:

$$Y=a+bx.....(1)$$

- Keterangan:
- Y=Kinerja Aparatur Pemerintah
- a=Konstanta
- b=koefisien regresi
- X=Anggaran Berbasis Kinerja

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas untuk melihat valid atau tidaknya data-data yang ada, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka item atau indikator tersebut dinyatakan valid. Pengujian validitas dan reliabilitas ini dibantu dengan aplikasi SPSS 25. Jumlah indicator dalam penelitian ini berjumlah 15 indikator. Berikut ini adalah Tabel 1 yang menyajikan data dari uji Validitas:

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	R _{Hitung}	Keterangan
Anggaran Berbasis Kinerja	0,387 - 0,615	Valid
Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah	0,363 - 0,542	Valid

Source: Data Penelitian, 2020

Berdasarkan table 1 di atas dapat dilihat bahwa hasil uji validitas dari butir-butir pertanyaan dalam kuesioner yang dibagikan mengenai anggaran berbasis kinerja dan kinerja aparatur pemerintah daerah adalah valid dengan skor di atas 0,05. Uji reliabilitas penelitian ini menggunakan Cronbanch alpha, jika nilai Cronbanch alpa lebih dari 0,60 maka pernyataan dinyatakan reliabel. Berikut ini hasil uji reliabilitas yang disajikan dalam table 2:

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbanch Alpha	Keterangan
Anggaran Berbasis Kinerja	0,654	Reliabel
Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah	0,611	Reliabel

Source: Data Penelitian, 2020

Berdasarkan table 2 di atas memperlihatkan bahwa hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai cronbanch alpha lebih dari 0,60 yang artinya variable dalam penelitian ini dapat dinyatakan reliabel. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana untuk melihat atau mengetahui sejauh mana pengaruh variable X terhadap variable Y, dalam penelitian ini yaitu anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		T	Sig.
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	30,517	7,947				
	Total_X1	,360	,168	,370		2,164	0,40

a. Dependent Variable: Total_Y

Source: Data Penelitian, 2020

Berdasarkan table 3 didapati hasil nilai Constanta (a) sebesar 30,517, dan nilai X (b / koefisien regresi) sebesar 0,360, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis sebagai berikut: $Y = a + bX$ atau $Y = 30,517 + 0,360X$ Berikut ini penjelasannya:

Constanta sebesar 30,517, artinya bahwa nilai konsisten kinerja aparatur pemerintah daerah adalah sebesar 30,517. Koefisien regresi X sebesar 0,360 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai X, maka nilai Y bertambah 0,360. Koefisien regresi tersebut bersifat positive, dengan hasil itu bisa dikatakan bahwa variable independent memberi pengaruh positive terhadap variable dependen. Berdasarkan nilai sig: Dari table diperoleh nilai sig bernilai $0,040 < 0,05$, maka kesimpulannya yaitu bahwa variable X berpengaruh terhadap variable Y. Dan berdasarkan nilai t: diketahui nilai thitung sebesar $2,146 > ttabel 2,045$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variable Independen (X) berpengaruh terhadap variable Dependen (Y). Hasil uji hipotesis memperlihatkan bahwa anggaran berbasis kinerja mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,040 yaitu lebih kecil dari 0,05 yang artinya H1 diterima. Dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.

KESIMPULAN

. Dari hasil penelitian maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa anggaran berbasis kinerja memberikan pengaruh positif kepada kinerja aparatur pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah harus terus memperhatikan setiap anggaran yang dikeluarkan untuk setiap SKPD yang ada agar supaya kinerja aparatur pemerintah daerah bisa tetap bisa menghasilkan kinerja yang maksimal untuk bisa memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat, karena semakin besar anggaran yang ada maka akan meningkatkan kinerja dari aparatur pemerintah daerah.

Penelitian ini juga memiliki hasil yang sama dengan penelitian sebelumnya, Febrina (2016) dimana Anggaran Berbasis Kinerja juga berpengaruh positif terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.

Dari hasil yang telah di teliti, berikut ini beberapa saran yang peneliti berikan untuk peneliti berikutnya. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk bisa mengkaji lebih banyak sumber maupun refrensi tentang anggaran berbasis kinerja, peneliti berikutnya diharapkan bisa melakukan penelitian menggunakan metode survey wawancara dengan sumber yang lebih kompeten lagi, peneliti selanjutnya diharapkan bisa menambah variabel-variabel lain yang bisa berpengaruh pada kinerja dari aparatur pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmoko, H. (2006). *Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektivitas Pengendalian*. Jurnal Akuntansi Pemerintah.
- Dedi, N. dkk. (2007). *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat.
- Dessler, G. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Salemba Empat.
- Didipu, R. O. (2017). *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Kota Gorontalo*.
- Evaranus, K. (2020). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Ketepatan Sasaran Anggaran, Dan Pengendalian Internal Pada Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Halidayati, I. (2014). Pengaruh Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal Dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh). *Jurnal Akuntansi*.
- Hasbar, M. H. (2016). *Menguak Perilaku Organisasi Sektor Publik Antara Teori dan Aplikasi*. Ombak.
- Junery, M. F., & Norhanisah. (2017). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Akuntansi Syariah*, 1 (2), 142–150.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press.
- Oktaviani, I. S. (2016). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Intervening (Survey pada Dinas-Dinas Pemerintah Kota Bandung). *Doctoral Dissertation*.
- Selviani, D. (n.d.). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cimahi. *Land Journal*, 117–124.
- Soraya, G. (2015). *Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Dan Sistem Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja*. 22, 1–10.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.
- Verasvera, F. (2016). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Manajemen Maranatha*, 15(2), 137–162.

Wardani, N. D., & Silvia, D. (2021). *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya. 6(1), 47–56.*